

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (L K I P) TAHUN 2019

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Gd. C. Lt. 2
Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 selesai disusun. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW.

LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 ini disusun seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2019 ini adalah Laporan Hasil Kinerja Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019. LKIP ini menitikberatkan kepada tuntutan pertanggungjawaban suatu organisasi dengan berbasis evaluasi kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Akhirnya, semoga LKIP ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam mengemban amanat rakyat.

Cimahi, Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah tulang punggung dalam pembiayaan daerah, karena tugas dan fungsinya merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk itu BAPENDA Kota Cimahi menetapkan beberapa sasaran strategis yang salah satunya adalah “Meningkatnya PAD”.

Target kinerja sasaran strategis tahun 2019 ada yang dapat terpenuhi dan ada juga yang tidak. Adapun permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja dianalisis untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan. Hasil capaian target kinerja sasaran memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan upaya BAPENDA secara keseluruhan baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya dalam mencapai tujuan organisasi. Persentase capaian kinerja yang diukur dari sasaran strategis BAPENDA tahun 2019 dijelaskan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Meningkatnya PAD	263,90%
2	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	420,96%
3	Terpeliharanya sistem perpajakan	100,00%
4	Tersusunnya target Pendapatan Daerah	100,00%
5	Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	100,00%
6	Terverifikasinya data wajib pajak	100,00%
7	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	92,10%
8	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	68,49%
9	Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	100,00%
10	Tersusunnya Produk Hukum	100,00%
11	Terawasinya objek pajak	100,00%
12	Terlaksananya sosialisasi terkait pajak daerah	100,00%

Demikian laporan ikhtisar eksekutif ini disusun untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi selanjutnya.

Cimahi, Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720130 199303 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	4
Bab II Perencanaan Kinerja	7
2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi	7
2.2 Visi Misi Bappenda Kota Cimahi	7
2.3 Arah Kebijakan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2019	8
2.4 Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Tahun 2019	8
2.5 Perjanjian Kinerja	9
2.6 Program dan Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja	10
2.7 Hasil Evaluasi LKIP Bappenda Tahun 2018	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja	16
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Bappenda	16
3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja	18
3.3 Realisasi Anggaran	19
3.4 Analisis Efisiensi	30
3.5 Analisis Kemandirian Daerah	31
3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan	31
Bab IV Penutup	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Keuangan Daerah).....	6
Tabel 2	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	9
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi Tahun 2019.....	10
Tabel 4	Program dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019.....	11
Tabel 5	Rincian Program dan Kegiatan BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019.	11
Tabel 6	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja BAPENDA Tahun 2018.....	14
Tabel 7	Capaian Kinerja BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019.....	16
Tabel 8	Capaian Kinerja BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019 Dengan Target RENSTRA 2018-2022.....	17
Tabel 9	Peningkatan Pendapatan Daerah.....	17
Tabel 10	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019.....	18
Tabel 11	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.	20
Tabel 12	Target dan Realisasi Pendapatan Bappenda Tahun 2019.....	22
Tabel 13	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2019.....	23
Tabel 14	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019.....	23
Tabel 15	Target dan Realisasi Pendapatan DPKP Tahun 2019.....	24
Tabel 16	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2019...	25
Tabel 17	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019...	25
Tabel 18	Target dan Realisasi Pendapatan DISDAGKOPERIN Tahun 2019....	26
Tabel 19	Target dan Realisasi Pendapatan SATPOL PP dan DAMKAR Tahun 2019.....	26
Tabel 20	Target dan Realisasi Pendapatan DISPANGTAN Tahun 2019.....	27
Tabel 21	Target dan Realisasi Pendapatan DPMPTSP Tahun 2019.....	27
Tabel 22	Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Cibabat Tahun 2019.....	28
Tabel 23	Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2019.....	28
Tabel 24	Target dan Realisasi Pendapatan DISKOMINFO Tahun 2019.....	29
Tabel 25	Target dan Realisasi Belanja BAPENDA Tahun 2019.....	29
Tabel 26	Analisis Efisiensi.....	30
Tabel 27	Analisis Kemandirian Daerah.....	31
Tabel 28	Capaian Sasaran 1.....	31
Tabel 29	Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	32
Tabel 30	Capaian Sasaran 2.....	32
Tabel 31	Realisasi Peningkatan Pajak Daerah.....	32
Tabel 32	Capaian Sasaran 3.1.....	33
Tabel 33	Capaian Sasaran 3.2.....	33
Tabel 34	Capaian Sasaran 4.....	33
Tabel 35	Capaian Sasaran 5.....	33

Tabel 36 Capaian Sasaran 6..... 34

Tabel 37 Capaian Sasaran 7 Sebelum Revisi..... 34

Tabel 38 Capaian Sasaran 7.1..... 34

Tabel 39 Capaian Sasaran 7.2..... 34

Tabel 40 Capaian Sasaran 8 Sebelum Revisi..... 35

Tabel 41 Capaian Sasaran 8..... 35

Tabel 42 Capaian Sasaran 9..... 36

Tabel 43 Capaian Sasaran 10..... 36

Tabel 44 Capaian Sasaran 11..... 36

Tabel 45 Capaian Sasaran 12 Sebelum Revisi..... 37

Tabel 46 Capaian Sasaran 12..... 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi..... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggung jawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan mengedepankan "Asas Akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tahun 2019 kepada Walikota Cimahi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2019. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dan Program/Kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 228 Tahun 2018);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016)
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 22);
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);

16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 492);

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan salah satu Badan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kota.

2. Fungsi Badan

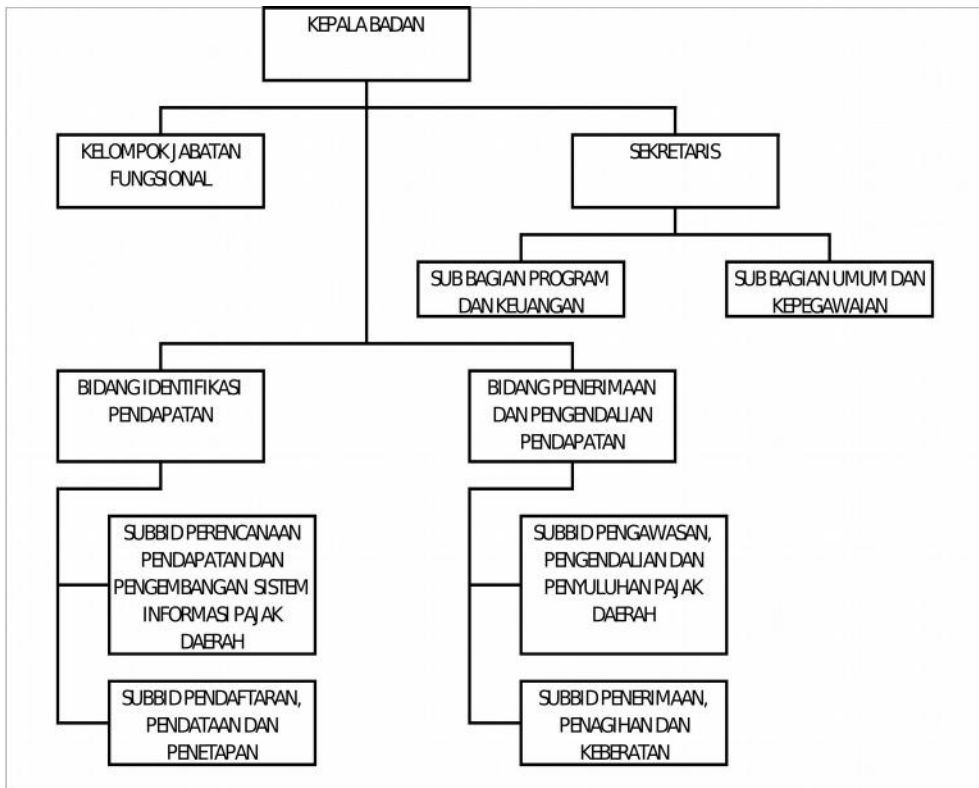
Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1)** Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- 2)** Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- 3)** Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- 4)** Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- 5)** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka dibentuklah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah sebagaimana tergambar di bawah ini :

Gambar 1
Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat Badan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3) Bidang Identifikasi Pendapatan, yang membawahi:
 - a. Subbid Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
 - b. Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- 4) Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, yang membawahi :
 - a. Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah
 - b. Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

1.4. Isu Strategis

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah dilaksanakan mulai 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan babak baru dalam pembangunan dan pemerataan daerah. Otonomi daerah diyakini merupakan

cara terbaik untuk mendorong pembangunan daerah dalam menggantikan sistem pembangunan terpusat yang dinilai kurang bisa mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan masing-masing daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik, pemerintah memiliki wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk menyelenggarakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita di suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.

Bantuan Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD.

Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukan mengeksplorasi pajak lokal secara lebih optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerah. Ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana perimbangan daripada PAD menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect*.

Flypaper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat Pemerintah Daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer berupa DAU dari pada menggunakan sumber dana kemampuan sendiri (Sukri dan Halim 2004; Maimunah 2006).

Tabel 1
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal
(Kemandirian Keuangan Daerah)

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Besar desentralisasi fiskal Kota Cimahi Tahun 2019 adalah 27,10% berarti kemandirian keuangan daerah Kota Cimahi memiliki predikat sedang dan seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa isu strategis Bapenda Kota Cimahi adalah ”**Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi**”

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Bapenda sebagai penunjang ikut mengemban visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Visi Wali Kota Cimahi yaitu :

“ Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan Visi dijabarkan dalam misi Wali Kota Cimahi, dan misi yang harus dilaksanakan Bapenda Kota Cimahi ada pada Misi 2 yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik”

Untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi Bapenda menerapkan visi dan misi Bapenda Kota Cimahi.

2.2. Visi Misi BAPENDA Kota Cimahi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai Visi yaitu :

“PROFESIONAL DALAM PENGKOORDINASIAN PENDAPATAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”.

Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut sebagai upaya mengaktualisasikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2017-2022, sehingga diharapkan menjadi penggerak roda pembangunan dalam penggalian potensi sumber-sumber pendapatan yang mendukung mewujudkan pembangunan Kota Cimahi yang baru, maju, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berbudaya.

Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Dengan misi badan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan atau *stakeholders* dapat lebih mengenal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, mengetahui dan memahami akan tugas pokok dan fungsi, program-program serta hasil yang akan dicapai di waktu-waktu

yang akan datang. Adapun Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

- | | |
|-----------------|--|
| Pertama, | Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah; |
| Kedua, | Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah. |

2.3. Arah Kebijakan BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019

Seiring dengan RPJMD sebagai penentu tujuan RENSTRA Bapenda Kota Cimahi, maka tujuan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan organisasi meliputi :

1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perpajakan;
2. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan menyusun target yang akan dicapai;
3. Cetak masal dan Sosialisasi SPPT PBB;
4. Memutakhirkan data pajak yang ada;
5. Berkoordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan upaya pencapaian target;
6. Menyiapkan payung hukum dalam pemungutan pajak daerah
7. Mengurangi penyimpangan pajak;
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat;
9. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.

2.4. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2019

Dalam Rencana Strategis 2017– 2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan (indikator kinerja utama), namun dalam prosesnya dilakukan review oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara terhadap keselarasan indikator kinerja Bapenda tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sebelum dan sesudah review Kemenpan dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2						
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja						
MIS	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
	SEBELUM REVIEW	SETELAH REVIEW	SEBELUM REVIEW	SETELAH REVIEW	SEBELUM REVIEW	SETELAH REVIEW
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan kemandirian/Desentralisasi fiskal Kota Cimahi	Sama	Meningkatnya PAD	Sama	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	Sama
MISI I : Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah						
			Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Sama	Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya	Sama
			Terpeliharanya sistem perpajakan	Sama	Jumlah modul	Sama
						Jumlah bulan pemeliharaan
			Tersusunnya target Pendapatan Daerah	Sama	Jumlah dokumen kegiatan	Sama
			Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	Sama	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	Jumlah SKPD yang dicetak dan didistribusikan
			Terverifikasinya data wajib pajak	Sama	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi	Sama
MISI II : Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah						
			Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Sama	Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pajak
						Persentase (%) OPD Penghasil yang mencapai target PAD
			Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Sama	Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang dibayar WP
			Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	Sama	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi	Sama
			Tersusunnya Raperda Pajak	Tersusunnya Produk Hukum	Jumlah dokumen Raperda Pajak	Jumlah dokumen Produk Hukum
			Terawasinya objek pajak	Sama	Jumlah objek pajak yang diperiksa	Sama
			Terbinanya wajib pajak	Terlaksananya sosialisasi terkait pajak daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi

2.5. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah menyusun Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Perkin ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019. Perkin Bapenda Kota Cimahi memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019. Matriks Perjanjian Kinerja Bapenda Kota Cimahi Tahun 2019 dijelaskan dalam tabel 3

Tabel 3			
Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi Tahun 2019			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	5,05%
2	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya	5%
3	Terpeliharanya sistem perpajakan	Jumlah modul	3 modul
		Jumlah bulan pemeliharaan	12 bulan
4	Tersusunnya target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan	4 dokumen
5	Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang dicetak dan didistribusikan	157.500 lembar
6	Terverifikasinya data wajib pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi	134.330 data
7	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pajak	70%
		Persentase (%) OPD Penghasil yang mencapai target PAD	70%
8	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Jumlah SKPD yang dibayar WP	118.711
9	Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi	72 kali
10	Tersusunnya Produk Hukum	Jumlah dokumen Produk Hukum	1 dokumen
11	Terawasinya objek pajak	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1200 objek pajak
12	Terlaksananya sosialisasi terkait pajak daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	6 kali

2.6. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2019 ini lebih menekankan pada bagaimana meningkatkan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah pada umumnya dan pajak daerah pada khususnya. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapenda Kota Cimahi, yaitu kegiatan belanja langsung dan kegiatan belanja tidak langsung. Adapun program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Cimahi terdiri dari 4 (empat) program yaitu :

Tabel 4		
Program dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019		
NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.536.082.606,00
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155.794.300,00
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	37.882.000,00
4	Program Perencanaan Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah	2.837.435.050
		4.567.193.956,00

Tabel 5
Rincian Program dan Kegiatan BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Rp. 1.536.082.606	a) Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 80%
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 200.091.386	Jumlah bulan penyediaan ATK selama 12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Rp. 23.872.460	Jumlah bulan penyediaan jasa selama 12 bulan
3	Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 115.182.532	Jumlah bulan penyediaan selama 12 bulan
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp. 464.603.382	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan 561 unit kali
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp. 70.647.000	Jumlah unit peralatan kantor 45 Unit
6	Penyediaan Gudang Kantor	Rp. 60.500.000	Jumlah gudang 1 Unit
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 16.143.100	Jumlah set peralatan rumah tangga 8 Set
No	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja
8	Penataan Arsip Daerah	Rp. 137.184.096	Jumlah arsip aktif dan inaktif 4.000 lembar
9	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan	Rp. 7.664.432	Jumlah bulan THL yang diasuransikan 12 Bulan

	dan Ketenagakerjaan		
10	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 68.316.500	Jumlah bulan penyediaan selama 12 bulan
			b) Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi 80%
11	Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	Rp. 302.874.218	Jumlah Perjalanan Dinas sebanyak 933 OH
12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 69.003.500	Jumlah bulan penyediaan jasa selama 12 bulan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 155.794.300	Nilai SAKIP Bapenda B
13	Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Rp. 7.899.200	Jumlah dokumen 4 Dokumen
14	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp. 47.044.000	Jumlah dokumen 3 Dokumen
15	Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	Rp. 17.204.100	Jumlah dokumen 9 Dokumen
16	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Rp. 83.647.000	Jumlah dokumen 9 Dokumen
No	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp. 37.882.000	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi 80%
17	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	Rp. 37.882.000	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih 90 orang
	Program Perencanaan	Rp. 2.837.435.050	a) Persentase

Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah			Peningkatan Pajak Daerah 5%
18	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Rp. 614.596.250	Jumlah modul 3 modul Jumlah bulan pemeliharaan 12 bulan
19	Penyusunan Target Pendapatan	Rp. 104.924.000	Jumlah dokumen 4 dokumen
20	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 539.480.000	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan 157.500 lembar
21	Verifikasi Data Wajib Pajak	Rp. 645.345.000	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi 134.330 data Wajib Pajak
			b) Tingkat Kepatuhan Pajak 70%
22	Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 159.590.000	Jumlah objek pajak yang diperiksa 1200 Objek Pajak
23	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 262.675.800	Jumlah pelaksanaan sosialisasi 6 Kali
No	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja
24	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	Rp. 278.162.000	Jumlah SKPD yang dibayar WP 118.711 WP
			c) Prosentase SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD 70%
25	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Rp. 214.422.000	Jumlah kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan dan Operasi Sisir 72 kali
26	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak	Rp. 18.240.000	Jumlah dokumen Produk Hukum 1 dokumen

	Daerah dan Retribusi		
--	----------------------	--	--

2.7. Hasil Evaluasi LKIP BAPENDA Tahun 2018

Hasil Evaluasi LKIP Bapenda Tahun 2018 oleh Inspektorat, diperoleh nilai 65.76 dengan predikat B. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel 6

Tabel 6				
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja BAPENDA Tahun 2018				
No	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	26,79	89,30%
	1) Perencanaan Strategis	10	8,29	82,90%
	2) Perencanaan Kinerja Tahunan	20	18,50	92,50%
2	Pengukuran Kinerja	25	14,38	57,52%
	1) Pemenuhan Pengukuran	5	3,75	75,00%
	2) Kualitas Pengukuran	13	8,44	67,52%
	3) Implementasi Pengukuran	8	2,19	29,20%
3	Pelaporan Kinerja	15	9,71	64,73%
	1) Pemenuhan Pelaporan	3	3,00	100,00%
	2) Penyajian Informasi Kinerja	8	4,91	65,47%
	3) Pemanfaatan Informasi Kinerja	5	1,80	40,00%
4	Evaluasi Internal	10	3,50	35,00%
	1) Pemenuhan Evaluasi	2	1,42	71,00%
	2) Kualitas Evaluasi	5	1,33	26,60%
	3) Pemanfaatan Evaluasi	3	0,75	25,00%
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	11,38	56,90%
	1) Kinerja yang dilaporkan(output)	7,5	4,50	60,00%
	2) Kinerja yang Dilaporkan (outcome)	12,5	6,88	55,04%
		100,00	65,76	65,76%

Rekomendasi perbaikan kinerja Bapenda adalah :

1. Perbaikan pengukuran Kinerja dalam hal kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran
2. Perbaikan Pelaporan Kinerja dalam hal penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja
3. Perbaikan evaluasi internal dalam hal kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi
4. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi dalam hal output dan outcome
5. Untuk sisa komponen pengukuran lainnya dapat ditingkatkan lagi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Sasaran BAPENDA

Pengukuran kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Tabel 7 menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Bapenda.

Tabel 7					
Capaian Kinerja BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	5,05%	13,33%	263,90%
2	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya	5%	21,05%	420,96%
3	Terpeliharanya sistem perpajakan	Jumlah modul	3 modul	3 modul	100,00%
		Jumlah bulan pemeliharaan	12 bulan	12 bulan	100,00%
4	Tersusunnya target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
5	Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang dicetak dan didistribusikan	157.500 lembar	157.500 lembar	100,00%
6	Terverifikasinya data wajib pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi	134.330 data	134.330 data	100,00%
7	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pajak	70%	59,71%	85,29%
		Persentase (%) OPD Penghasil yang mencapai target PAD	70%	69,23%	98,90%
8	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Jumlah SKPD yang dibayar WP	118.711	81.305	68,49%
9	Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi	72 kali	72 kali	100,00%
10	Tersusunnya Produk Hukum	Jumlah dokumen Produk Hukum	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
11	Terawasinya objek pajak	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1200 objek pajak	1200 objek pajak	100,00%
12	Terlaksananya sosialisasi terkait pajak daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	6 kali	6 kali	100,00%

Tabel 8					
Capaian Kinerja BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019 Dengan Target RENSTRA 2018-2022					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	42,94%	13,33%	31,04%
2	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya	5%	21,05%	420,96%
3	Terpeliharanya sistem perpajakan	Jumlah modul	3 modul	3 modul	100,00%
		Jumlah bulan pemeliharaan	12 bulan	12 bulan	100,00%
4	Tersusunnya target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	82,27%
5	Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang dicetak dan didistribusikan	157.500 lembar	157.500 lembar	100,00%
6	Terverifikasinya data wajib pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi	134.330 data	134.330 data	100,00%
7	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pajak	70%	59,71%	85,29%
		Persentase (%) OPD Penghasil yang mencapai target PAD	70%	69,23%	98,90%
8	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Jumlah SKPD yang dibayar WP	118.711	81.305	68,49%
9	Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi	72 kali	72 kali	99,33%
10	Tersusunnya Produk Hukum	Jumlah dokumen Produk Hukum	1 dokumen	1 dokumen	152,17%
11	Terawasinya objek pajak	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1200 objek pajak	1200 objek pajak	100,00%
12	Terlaksananya sosialisasi terkait pajak daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	6 kali	6 kali	100,00%

Dasar penghitungan capaian target indikator kinerja sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Eselon II dan III Bapenda Kota Cimahi adalah penghitungan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cimahi berikut ini :

Tabel 9			
Peningkatan Pendapatan Daerah			
Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Peningkatan Realisasi
Pendapatan asli daerah	335.016.530.127,39	379.663.505.399,15	13,33%
Pajak daerah	134.770.330.583,00	163.137.074.872,00	21,05%
Retribusi daerah	12.220.530.827,00	15.856.315.921,00	29,75%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.297.600.000,00	-1,00%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	178.634.468.717,39	191.372.514.606,15	7,13%
Dana perimbangan	788.025.064.842,00	798.486.304.727,00	1,33%
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	66.808.176.054,00	60.483.901.742,00	-9,47%
Dana alokasi umum	576.278.051.000,00	596.026.304.000,00	3,43%
Dana alokasi khusus	144.938.837.788,00	141.976.098.985,00	-2,04%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	193.188.881.153,00	222.569.965.603,00	15,21%
Pendapatan hibah	2.192.000.000,00	1.764.000.000,00	-19,53%
Dana darurat			
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	128.044.295.494,00	129.853.567.820,00	1,41%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	48.285.436.943,00		-100,00%
Dana Alokasi Cukai			#DIV/0!
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	10.167.148.716,00	48.860.258.783,00	380,57%
Dana Insentif Daerah	4.500.000.000,00	42.092.139.000,00	835,38%
	1.316.230.476.122,39	1.400.719.775.729,15	6,42%

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program dan Kegiatan Bapenda Kota Cimahi Akhir Tahun 2018 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Bapenda Kota Cimahi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 10							
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019							
No	Kegiatan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Capaian	Target Fisik	Realisasi Fisik	Capaian
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.536.082.606	1.439.591.707	93,72%	a) Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 80%	80%	100%
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.091.386	197.987.600	98,95%	Jumlah bulan penyediaan ATK selama 12 bulan	12 bulan	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	23.872.460	14.337.768	60,06%	Jumlah bulan penyediaan jasa selama 12 bulan	12 bulan	100%
3	Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan dan Penggandaan	115.182.532	114.353.579	99,28%	Jumlah bulan penyediaan selama 12 bulan	12 bulan	100%
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	464.603.382	422.447.982	90,93%	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan 561 unit kali	561 unit kali	100%
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	70.647.000	60.202.000	85,22%	Jumlah unit peralatan kantor 45 Unit	45 Unit	100%
6	Penyediaan Gudang Kantor	60.500.000	60.500.000	100,00%	Jumlah gudang 1 Unit	1 Unit	100%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.143.100	15.799.000	97,87%	Jumlah set peralatan rumah tangga 8 Set	8 Set	100%
8	Penataan Arsip Daerah	137.184.096	133.487.210	97,31%	Jumlah arsip aktif dan inaktif 4.000 lembar	4.000 lembar	100%
9	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	7.664.432	3.992.432	52,09%	Jumlah bulan THL yang diasuransikan 12 Bulan	12 bulan	100%
10	Penyediaan makanan dan minuman	68.316.500	62.432.500	91,39%	Jumlah bulan penyediaan selama 12 bulan	12 bulan	100%
					b) Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi 80%	80%	100%
11	Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	302.874.218	296.187.192	97,79%	Jumlah Perjalanan Dinas sebanyak 933 OH	933 OH	100%
12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	69.003.500	57.864.444	83,86%	Jumlah bulan penyediaan jasa selama 12 bulan	12 bulan	100%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155.794.300	145.943.441	93,68%	Nilai SAKIP Bapenda B	B	100%
13	Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	7.899.200	7.226.400	91,48%	Jumlah dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	100%
14	Penyusunan Laporan Keuangan	47.044.000	43.864.047	93,24%	Jumlah dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	100%
15	Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	17.204.100	16.839.050	97,88%	Jumlah dokumen 9 Dokumen	9 Dokumen	100%

No	Kegiatan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Capaian	Target Fisik	Realisasi Fisik	Capaian
16	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	83.647.000	78.013.944	93,27%	Jumlah dokumen 9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	37.882.000	25.982.000	68,59%	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi 80%	80%	100%
17	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	37.882.000	25.982.000	68,59%	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih 90 orang	90 orang	100%
	Program Perencanaan Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah	18.240.000	17.790.000	97,53%	a) Persentase Peningkatan Pajak Daerah 5%	21,05%	421%
18	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	614.596.250	580.347.089	94,43%	Jumlah modul 3 modul	3 modul	100%
					Jumlah bulan pemeliharaan 12 bulan	12 bulan	100%
19	Penyusunan Target Pendapatan	104.924.000	86.533.936	82,47%	Jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	100%
20	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	539.480.000	502.147.725	93,08%	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan 157.500 lembar	157.500 lembar	100%
21	Verifikasi Data Wajib Pajak	645.345.000	620.359.448	96,13%	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi 134.330 data Wajib Pajak	134.330 data	100%
					b) Tingkat Kepatuhan Pajak 70%	59,71%	85,29%
22	Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	159.590.000	144.383.204	90,47%	Jumlah objek pajak yang diperiksa 1200 Objek Pajak	1200 Objek Pajak	100%
23	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	262.675.800	245.385.528	93,42%	Jumlah pelaksanaan sosialisasi 6 Kali	6 Kali	100%
24	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	278.162.000	250.620.284	90,10%	Jumlah SKPD yang dibayar WP 118.711 WP	81.305	68,49%
					c) Prosentase SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD 70%	69,23%	98,90%
25	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	214.422.000	193.823.138	90,39%	Jumlah kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan dan Operasi Sisir 72 kali	72 kali	100%
26	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi	18.240.000	17.790.000	97,53%	Jumlah dokumen Produk Hukum 1 dokumen	1 dokumen	100%
		2.556.271.456	2.381.579.678	93,17%			

3.3 Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya

yang sah, dana perimbangan pajak dan bukan pajak dan pendapatan lain-lain. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah selain mengelola anggaran pendapatan Bapenda juga sebagai koordinator seluruh pendapatan Kota Cimahi. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Akhir Tahun 2019 sebesar Rp. 1.400.719.775.729,15 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11			
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019			
Uraian	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Realisasi 2019
Pendapatan asli daerah	354.211.073.635,28	379.663.505.399,15	107,19%
Pajak daerah	161.488.910.896,42	163.137.074.872,00	101,02%
Retribusi daerah	14.585.901.970,86	15.856.315.921,00	108,71%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.297.600.000,00	9.297.600.000,00	100,00%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	168.838.660.768,00	191.372.514.606,15	113,35%
Dana perimbangan	831.965.967.000,00	798.486.304.727,00	95,98%
Dana bagi hasil pajak	45.893.865.000,00	36.324.723.847,00	79,15%
Dana bagi hasil bukan pajak	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,85%
Dana alokasi umum	596.026.304.000,00	596.026.304.000,00	100,00%
Dana alokasi khusus	162.229.380.000,00	141.976.098.985,00	87,52%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	324.017.422.024,00	222.569.965.603,00	68,69%
Hibah	47.806.800.000,00	1.764.000.000,00	3,69%
DBH dari Provinsi	134.544.926.464,00	129.853.567.820,00	96,51%
Dana Insentif Daerah	42.092.139.000,00	42.092.139.000,00	100,00%
Bantuan dari Provinsi	99.573.556.560,00	48.860.258.783,00	49,07%
	1.510.194.462.659,28	1.400.719.775.729,15	92,75%

Pendapatan daerah total tercapai 92,75% terdiri dari pencapaian PAD 107,19%, Dana Perimbangan 95,98% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 68,69%.

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah sudah tercapai lebih dari 100%. Begitu pula dengan komponen PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sudah tercapai lebih dari 100%.

Dana Perimbangan tidak mencapai 100%, bila dirinci komponen-komponen Dana Perimbangan maka yang tidak terealisasi 100% adalah :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak 79,15% dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 86,85%, Pencairan DBH Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat bergantung kepada realisasi penerimaan di Pemerintah Pusat

dan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga ada di luar kendali Bapenda Kota Cimahi.

- b. Dana Alokasi Khusus 87,52%, pencairan DAK bergantung kepada pengajuan kegiatan dari SKPD terkait. Jika DAK tidak terealisasi 100% maka SKPD yang kegiatannya bersumber dari DAK tidak merealisasikan anggaran kegiatan tersebut 100%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 68,69%, bila dirinci komponen-komponennya maka yang tidak terealisasi 100% adalah :

- a. Hibah 3,69%, untuk kode rekening ini sampai akhir Januari Dinas Pendidikan belum melaporkan realisasi penerimaan BOS sehingga belum tercatat di Bapenda.
- b. DBH Provinsi 96,51%, pencairan DBH Provinsi Triwulan IV Tahun 2019 adalah realisasi DBH Provinsi sampai dengan minggu ke 2 Desember 2019. Sisa DBH Provinsi dua minggu terakhir di bulan Desember Triwulan IV Tahun 2019 dicairkan di awal Tahun 2020.
- c. Bantuan Provinsi 49,07%, pencairan Bantuan Provinsi bergantung kepada pengajuan kegiatan dari SKPD terkait. Jika Bantuan Provinsi tidak terealisasi 100% maka SKPD yang kegiatannya bersumber dari Bantuan Provinsi tidak merealisasikan anggaran kegiatan tersebut 100%. Dalam hal ini Dinas PUPR tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Underpas/Fly Over Sriwijaya sebesar Rp. 50.000.000.000,-.

Semua faktor penyebab diatas menunjukan bahwa ada keadaan diluar kendali Bapenda yang dapat mempengaruhi tingkat realisasi Pendapatan Daerah sehingga akhirnya berdampak pada tingkat capaian kinerja Bapenda Kota Cimahi.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah SKPD Penghasil Tahun 2019

Secara khusus realisasi pendapatan dari masing-masing SKPD Penghasil sebagai berikut :

1) **Badan Pengelola Pendapatan Daerah**

Tabel 12			
Target dan Realisasi Pendapatan Bappenda Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	530.999.618.749,42	470.071.809.740,15	88,53%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	181.078.713.725,42	187.017.942.395,15	103,28%
Hasil Pajak Daerah	161.488.910.896,42	163.137.074.872,00	101,02%
Pajak Hotel	558.817.380,00	677.849.974,00	121,30%
Pajak Restoran	14.000.000.000,00	16.142.485.383,00	115,30%
Pajak Hiburan	655.757.776,00	781.622.970,00	119,19%
Pajak Reklame	2.209.522.607,00	2.408.147.250,00	108,99%
Pajak Penerangan Jalan	42.137.077.750,00	41.154.787.753,00	97,67%
Pajak Parkir	765.584.544,00	894.987.772,00	116,90%
Pajak Air Tanah	9.707.222.858,00	9.264.450.238,00	95,44%
Pajak BPHTB	42.522.665.206,42	41.515.469.387,00	97,63%
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	48.932.262.775,00	50.297.274.145,00	102,79%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.297.600.000,00	9.297.600.000,00	100,00%
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			#DIV/0!
Lembaga Keuangan Bank (Bank Jabar)	9.297.600.000,00	9.297.600.000,00	100,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.292.202.829,00	14.583.267.523,15	141,69%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	750.000.000,00	744.086.500,00	99,21%
Penerimaan Jasa Giro	6.445.275.696,00	5.727.589.583,63	88,86%
Rekening Deposito	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	110.459.167,00	93.825.000,00	84,94%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	497.171.412,00	#DIV/0!
Pendapatan Denda Pajak	395.370.655,00	1.123.758.169,00	284,23%
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	1.300.000.000,00	5.054.108.237,00	388,78%
Sumbangan Pihak Ketiga	320.021.137,00	336.222.192,00	105,06%
Pendapatan Bunga Lain-lain	246.076.174,00	281.734.427,52	114,49%
Pendapatan Denda	-	-	-
Hasil Penyewaan Aset Daerah	725.000.000,00	724.772.002,00	-
DANA PERIMBANGAN	73.710.283.000,00	60.483.901.742,00	82,06%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.710.283.000,00	60.483.901.742,00	82,06%
Bagi Hasil Pajak	45.893.865.000,00	36.324.723.847,00	79,15%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,85%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	276.210.622.024,00	222.569.965.603,00	80,58%
Pendapatan Hibah	-	1.764.000.000,00	#DIV/0!
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	134.544.926.464,00	129.853.567.820,00	96,51%
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	99.573.556.560,00	48.860.258.783,00	49,07%
Dana Insentif Daerah	42.092.139.000,00	42.092.139.000,00	100,00%
Dana Insentif Daerah	42.092.139.000,00	42.092.139.000,00	100,00%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp. 470.071.809.740,15 atau 88,53% dari target 2019.

2) Dinas Kesehatan

Tabel 13			
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	20.530.785.439,00	19.328.065.239,00	94,14%
Pendapatan Asli Daerah	20.530.785.439,00	19.328.065.239,00	94,14%
Hasil Retribusi Daerah	1.984.327.500,00	2.172.334.000,00	109,47%
Retribusi Jasa Umum	1.984.327.500,00	2.172.334.000,00	109,47%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.984.327.500,00	2.172.334.000,00	109,47%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.546.457.939,00	17.155.731.239,00	92,50%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Dinkes	500.000,00	2.874.664,00	574,93%
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.308.957.939,00	16.901.915.575,00	92,32%
Dana Non Kapitasi	237.000.000,00	250.941.000,00	105,88%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp. 19.328.065.239,00 atau 94,14% dari target 2019.

3) Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 14			
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.678.872.100,00	1.830.518.500,00	109,03%
Pendapatan Asli Daerah	1.678.872.100,00	1.830.518.500,00	109,03%
Hasil Retribusi Daerah	1.678.872.100,00	1.830.518.500,00	109,03%
Retribusi Jasa Umum	1.278.872.100,00	1.364.640.000,00	106,71%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.278.872.100,00	1.364.640.000,00	106,71%
		-	
Retribusi Jasa Usaha	400.000.000,00	465.878.500,00	116,47%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	465.878.500,00	116,47%
laboratorium lingkungan	400.000.000,00	465.878.500,00	116,47%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.830.518.500,00 atau 109,03 % dari target 2019.

4) DPKP

Tabel 15			
Target dan Realisasi Pendapatan DPKP Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	5.512.264.000,00	6.109.592.287,00	110,84%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	5.512.264.000,00	6.109.592.287,00	110,84%
Hasil Retribusi Daerah	5.512.264.000,00	6.044.106.097,00	109,65%
		-	
Retribusi Jasa Umum	177.264.000,00	236.625.000,00	133,49%
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	96.050.000,00	111.595.000,00	116,18%
Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus	45.400.000,00	84.485.000,00	186,09%
Pengelolaan Limbah Cair	35.814.000,00	40.545.000,00	113,21%
Retribusi Jasa Usaha	5.335.000.000,00	5.807.481.097,00	108,86%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.635.000.000,00	3.012.076.197,00	114,31%
Rumah Susun Sewa	2.635.000.000,00	3.012.076.197,00	114,31%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.700.000.000,00	2.795.404.900,00	103,53%
- Pemakaian Air Minum	2.700.000.000,00	2.795.404.900,00	103,53%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	65.486.190,00	#DIV/0!
		-	
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	65.486.190,00	#DIV/0!
Pendapatan Denda Retribusi Rusunawa	-	27.051.190,00	#DIV/0!
Pendapatan Denda Retribusi Air Minum	-	38.435.000,00	#DIV/0!

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola DPKP sebesar Rp. 6.109.592.287,00 atau 110,84 % dari target 2019.

5) Dinas Perhubungan

Tabel 16			
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.560.632.960,00	1.565.792.010,00	100,33%
Pendapatan Asli Daerah	1.560.632.960,00	1.565.792.010,00	100,33%
Hasil Retribusi Daerah	1.560.632.960,00	1.565.792.010,00	100,33%
Retribusi Jasa Umum	1.379.130.960,00	1.418.943.010,00	102,89%
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	699.800.000,00	718.769.000,00	102,71%
		-	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	679.330.960,00	700.174.010,00	103,07%
Retribusi Jasa Usaha	150.002.000,00	130.649.000,00	87,10%
		-	
Retribusi Terminal	150.002.000,00	130.649.000,00	87,10%
Retribusi Perizinan Tertentu	31.500.000,00	16.200.000,00	51,43%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp. 1.565.792.010,00 atau 100,33% dari target 2019.

6) Dinas Tenaga Kerja

Tabel 17			
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	935.870.600,00	133,70%
Pendapatan Asli Daerah	700.000.000,00	935.870.600,00	133,70%
Hasil Retribusi Daerah	700.000.000,00	935.870.600,00	133,70%
Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan	700.000.000,00	935.870.600,00	133,70%
Retribusi Perpanjangan IMTA	700.000.000,00	935.870.600,00	133,70%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp. 935.870.600,00 atau 133,70% dari target 2019.

7) DISDAGKOPERIN

Tabel 18			
Target dan Realisasi Pendapatan DISDAGKOPERIN Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.152.327.976,00	1.342.687.875,00	116,52%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	1.152.327.976,00	1.342.687.875,00	116,52%
Hasil Retribusi Daerah	1.152.327.976,00	1.335.690.100,00	115,91%
		-	
Retribusi Jasa Umum	752.327.976,00	806.006.600,00	107,14%
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar	752.327.976,00	771.906.700,00	102,60%
Retribusi Jasa Umum Tera Ulang	-	34.099.900,00	#DIV/0!
		-	
Retribusi Jasa Usaha	400.000.000,00	529.683.500,00	132,42%
Baros Information Technology Creative Center	400.000.000,00	529.683.500,00	132,42%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	6.997.775,00	#DIV/0!
		-	
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	6.997.775,00	#DIV/0!

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Disdagkoperin sebesar Rp. 1.342.687.875,00 atau 116,52% dari target 2019.

8) SATPOL PP dan DAMKAR

Tabel 19			
Target dan Realisasi Pendapatan SATPOL PP dan DAMKAR Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	79.806.000,00	159,61%
Pendapatan Asli Daerah	50.000.000,00	79.806.000,00	159,61%
Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	79.806.000,00	159,61%
Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	79.806.000,00	159,61%
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	79.806.000,00	159,61%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Satpol PP dan Damkar sebesar Rp. 79.806.000,00 atau 159,61% dari target 2019.

9) DISPANGTAN

Tabel 20			
Target dan Realisasi Pendapatan DISPANGTAN Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	260.100.000,00	255.313.000,00	98,16%
Pendapatan Asli Daerah	260.100.000,00	255.313.000,00	98,16%
Hasil Retribusi Daerah	260.100.000,00	255.313.000,00	98,16%
Retribusi Jasa Usaha	260.100.000,00	255.313.000,00	98,16%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	220.000.000,00	212.745.000,00	96,70%
Retribusi Pengobatan Hewan	220.000.000,00	212.745.000,00	96,70%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.100.000,00	42.568.000,00	106,15%
- Balai Benih Ikan Air Tawar	40.100.000,00	42.568.000,00	106,15%

Realisasi pendapatan daerah dari Dispangtan sebesar Rp. 255.313.000,00 atau 98,16% dari target 2019.

10) DPMPTSP

Tabel 21			
Target dan Realisasi Pendapatan DPMPTSP Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.555.214.062,50	1.636.885.614,00	105,25%
Pendapatan Asli Daerah	1.555.214.062,50	1.636.885.614,00	105,25%
Hasil Retribusi Daerah	1.555.214.062,50	1.636.885.614,00	105,25%
Retribusi Perizinan Tertentu	1.555.214.062,50	1.636.885.614,00	105,25%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.555.214.062,50	1.636.885.614,00	105,25%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola DPMPTSP sebesar Rp. 1.636.885.614,00 atau 105,25% dari target 2019.

11) RSUD Cibabat

Tabel 22			
Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Cibabat Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	140.000.000.000,00	159.561.031.879,00	113,97%
Pendapatan Asli Daerah	140.000.000.000,00	159.561.031.879,00	113,97%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.000.000.000,00	159.561.031.879,00	113,97%
Pendapatan dari badan layanan umum daerah	140.000.000.000,00	159.561.031.879,00	113,97%
Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	140.000.000.000,00	159.561.031.879,00	113,97%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola RSUD Cibabat sebesar Rp. 159.561.031.879,00 atau 113,97% dari target 2019.

12) BPKAD

Tabel 23			
Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	806.062.484.000,00	738.002.402.985,00	91,56%
Dana Perimbangan	758.255.684.000,00	738.002.402.985,00	97,33%
Dana Alokasi Umum	596.026.304.000,00	596.026.304.000,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus	162.229.380.000,00	141.976.098.985,00	87,52%
Dana alokasi khusus Fisik	56.563.810.000,00	48.294.625.581,00	85,38%
Dana alokasi khusus Non Fisik	105.665.570.000,00	93.681.473.404,00	88,66%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	47.806.800.000,00	-	0,00%
Pendapatan Hibah Pemerintah (BOS)	47.806.800.000,00	-	0,00%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola BPKAD sebesar Rp. 738.002.402.985,00 atau 91,56% dari target 2019

13) DISKOMINFO

Tabel 24			
Target dan Realisasi Pendapatan DISKOMINFO Tahun 2019			
URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	132.163.372,36	-	0,00%
Pendapatan Asli Daerah	132.163.372,36	-	0,00%
Hasil Retribusi Daerah	132.163.372,36	-	0,00%
Retribusi Jasa Umum	132.163.372,36	-	0,00%
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	132.163.372,36	0,00	0,00%

3. Target dan Realisasi Belanja BAPENDA Kota Cimahi Tahun 2019

Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 25				
Target dan Realisasi Belanja BAPENDA Tahun 2019				
No.	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	BELANJA	14.500.727.105,64	12.973.990.397,00	89,47%
I.	Belanja Tidak Langsung	9.933.533.149,64	8.721.082.897,00	87,79%
	Belanja Pegawai	9.933.533.149,64	8.721.082.897,00	87,79%
II.	Belanja Langsung	4.567.193.956,00	4.252.907.500,00	93,12
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.536.082.606,00	1.439.591.707,00	93,72
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang & Jasa	1.536.082.606,00	1.439.591.707,00	93,72
	Belanja Modal			
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.882.000,00	25.982.000,00	68,59
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang & Jasa	37.882.000,00	25.982.000,00	68,59
	Belanja Modal			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155.794.300,00	145.943.441,00	93,68
	Belanja Pegawai	21.798.000	20.966.000	96,18
	Belanja Barang & Jasa	133.996.300	124.977.441	93,27
	Belanja Modal			
4	Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah	2.837.435.050,00	2.641.390.352,00	93,09
	Belanja Pegawai	91.904.000	88.309.000	96,09
	Belanja Barang & Jasa	2.745.531.050	2.553.081.352	92,99
	Belanja Modal			

3.4. Analisis Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan suatu organisasi perlu diukur dalam suatu ukuran analisis antara pendapatan dan belanja. Pendapatan dan

Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 26
Analisis Efisiensi

No.	Uraian	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1)	PENDAPATAN			
(1)	Pendapatan Asli Daerah	181.078.713.725,42	187.017.942.395,15	103,28
(2)	Dana Perimbangan	73.710.283.000,00	60.483.901.742,00	82,06
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	276.210.622.024,00	222.569.965.603,00	80,58
	Jumlah 1	530.999.618.749,42	470.071.809.740,15	88,53
2)	BELANJA			
(1)	Belanja Tidak Langsung	9.933.533.149,64	8.721.082.897,00	87,79
(2)	Belanja Langsung	4.567.193.956,00	4.252.907.500,00	93,12
	Jumlah 2	14.500.727.105,64	12.973.990.397,00	89,47
	Surplus/defisit	516.498.891.643,78	457.097.819.343,15	88,50

Persentase pencapaian pendapatan yang dikelola Bapenda Kota Cimahi sampai dengan akhir Tahun 2019 dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 103,28 %, Dana Perimbangan 82,06 %. dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 80,58 %. Persentase pencapaian belanja dari Belanja Tidak Langsung sampai dengan akhir Tahun 2019 sebesar 87,79 % dan Belanja Langsung sebesar 93,12 %.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian target pendapatan daerah secara total sudah cukup baik yaitu 88,53% dan realisasi belanja Bapenda secara total mencapai 88,50 juga sudah cukup baik, dengan surplus Rp. 457.097.819.343,15.

3.5. Analisis Kemandirian Daerah

Perkembangan kemandirian daerah Kota Cimahi setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 27
Analisis Kemandirian Daerah

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN	REALISASI PAD	RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN	TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH
2015	1.186.804.131.668,44	268.816.074.332,44	22,65%	SEDANG
2016	1.218.994.660.218,34	286.049.615.484,34	23,47%	SEDANG
2017	1.481.647.893.979,88	383.911.991.301,88	25,91%	SEDANG
2018	1.316.230.476.122,39	335.016.530.127,39	25,45%	SEDANG
2019	1.400.719.775.729,15	379.663.505.399,15	27,10%	SEDANG

Tabel diatas menunjukan bahwa Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi cenderung semakin meningkat setiap tahunnya begitu pula di Tahun 2019 meningkat 1,65% walaupun masih di kriteria SEDANG.

3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis Bapenda dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya PAD

Tabel 28			
Capaian Sasaran 1			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN
Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya (2017)	8,71%	34,21%	392,77%
Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya (2018)	4,38%	-12,74%	-290,94%
Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya (2019)	5,05%	13,33%	263,96%

Sasaran Strategis ini adalah Indikator Kinerja Utama Bapenda dan Tahun 2019 telah mencapai target. Pada Tahun 2018 sasaran ini tidak tercapai karena adanya anomali di tahun 2017, namun bila dihitung secara jangka panjang yaitu selama 7 tahun PAD Kota Cimahi rata-rata telah mengalami peningkatan sebesar 12,07%.

Tabel 29	
Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
Tahun	Realisasi
2013	191.599.456.904,09
2014	227.949.120.180,56
2015	268.816.074.332,44
2016	286.049.615.484,34
2017	383.911.991.301,88
2018	335.016.530.127,39
2019	379.663.505.399,15
Rata-Rata Peningkatan	12,07%

2. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Setiap Tahunnya

Tabel 30			
Capaian Sasaran 2			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya (2017)	7%	47,59%	679,86%
Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya (2018)	5%	-18,52%	-370,33%
Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya (2019)	5%	21,05%	421,00%

Sasaran Strategis ini adalah Indikator Kinerja Program Bapenda dan Tahun 2019 telah mencapai target. Pada Tahun 2018 sasaran ini tidak tercapai karena adanya anomali di tahun 2017, namun bila dihitung secara jangka panjang yaitu selama 7 tahun Pajak Daerah Kota Cimahi rata-rata telah mengalami peningkatan sebesar 10,09%.

Tabel 31	
Realisasi Peningkatan Pajak Daerah	
Tahun	Realisasi
2013	91.644.684.568,00
2014	91.795.256.385,00
2015	112.124.306.126,00
2016	112.060.908.223,00
2017	165.391.683.082,00
2018	134.770.330.583,00
2019	163.137.074.872,00
Rata-Rata Peningkatan	10,09%

3. Terpeliharanya Sistem Perpajakan

Tabel 32			
Capaian Sasaran 3.1			
INDIKATOR KINERJA 1	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah modul (2017)	2 paket	2 paket	100,00%
Jumlah modul (2018)	3 modul	3 modul	100,00%
Jumlah modul (2019)	3 modul	3 modul	100,00%

Sesuai revisi Menpan RB ada penambahan indikator pada sasaran strategis ini yaitu :

Tabel 33			
Capaian Sasaran 3.2			
INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah bulan pemeliharaan (2017)	12 bulan	12 bulan	100,00%
Jumlah bulan pemeliharaan (2018)	12 bulan	12 bulan	100,00%
Jumlah bulan pemeliharaan (2019)	12 bulan	12 bulan	100,00%

Kedua indikator ini tercapai dan tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

4. Tersusunnya Target Pendapatan Daerah

Tabel 34			
Capaian Sasaran 4			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah dokumen kegiatan (2017)	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
Jumlah dokumen kegiatan (2018)	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
Jumlah dokumen kegiatan (2019)	4 dokumen	4 dokumen	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

5. Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah

Tabel 35			
Capaian Sasaran 5			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan (2017)	123.000 lembar	123.000 lembar	100,00%
Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan (2018)	150.000 lembar	150.000 lembar	100,00%
Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan (2019)	157.500 lembar	157.500 lembar	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

6. Terverifikasinya Data Wajib Pajak

Tabel 36			
Capaian Sasaran 6			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi (2017)	115.361 data	115.361 data	100,00%
Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi (2018)	134.330 data	138.786 data	103,32%
Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi (2019)	134.330 data	134.330 data	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

7. Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah
- Sesuai revisi Menpan RB ada perubahan indikator pada sasaran strategis ini yang semula adalah :

Tabel 37			
Capaian Sasaran 7 Sebelum Revisi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pencapaian realisasi Pendapatan (2017)Daerah	90%	102,53%	113,92%
Persentase pencapaian realisasi Pendapatan (2018)Daerah	90%	96,90%	107,66%
Persentase pencapaian realisasi Pendapatan (2019)Daerah	90%	92,75%	103,06%

Indikator ini tetap disajikan sebagai pembanding. Sedangkan indikator hasil revisi Menpan RB adalah :

Tabel 38			
Capaian Sasaran 7.1			
INDIKATOR KINERJA 1	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Kepatuhan Pajak (2017)	70%	59,45%	84,93%
Tingkat Kepatuhan Pajak (2018)	70%	62,24%	88,92%
Tingkat Kepatuhan Pajak (2019)	70%	59,71%	85,29%

Tabel 39			
Capaian Sasaran 7.2			
INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) OPD Penghasil yang mencapai target PAD (2017)	70%	75,00%	107,14%
Persentase (%) OPD Penghasil yang mencapai target PAD (2018)	70%	66,67%	95,24%
Persentase (%) OPD Penghasil yang mencapai target PAD (2019)	70%	69,23%	98,90%

Indikator Kinerja 1 sasaran strategis ini yaitu Tingkat Kepatuhan Pajak merupakan persentase jumlah SKPD yang dibayar dibandingkan jumlah

SKPD yang ditetapkan. Tahun 2019 tidak tercapai begitu pula dua tahun sebelumnya. Bila dirinci maka sebagian besar SKPD yang tidak dibayar adalah dari Pajak PBB. Hal ini diperkirakan karena masih adanya data sampah yang diwariskan saat peralihan PBB menjadi Pajak Daerah dari KPP Pratama.

Indikator Kinerja 2 sasaran strategis ini yaitu Persentase OPD Penghasil yang mencapai target PAD merupakan jumlah SKPD Penghasil yang berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah dibandingkan jumlah total SKPD Penghasil. Tahun 2019 tidak tercapai begitu pula tahun 2018. Hal ini diperkirakan karena kurang akuratan dalam penentuan target.

8. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak
- Sesuai revisi Menpan RB ada perubahan indikator pada sasaran strategis ini yang semula adalah :

Tabel 40			
Capaian Sasaran 8 Sebelum Revisi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah (2017)	75%	59,45%	79,27%
Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah (2018)	75%	62,24%	82,99%
Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah (2019)	75%	59,71%	79,61%

Indikator ini tetap disajikan sebagai pembanding. Sedangkan indikator hasil revisi Menpan RB adalah :

Tabel 41			
Capaian Sasaran 8			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah SKPD yang dibayar WP (2017)	118711	78.891	66,46%
Jumlah SKPD yang dibayar WP (2018)	118711	81.765	68,88%
Jumlah SKPD yang dibayar WP (2019)	118711	81.305	68,49%

Indikator Kinerja sasaran strategis ini yaitu Jumlah SKPD yang dibayar WP Tahun 2019 tidak tercapai begitu pula dua tahun sebelumnya. Bila dirinci maka sebagian besar SKPD yang tidak dibayar adalah dari Pajak PBB. Hal ini diperkirakan karena masih adanya data sampah yang diwariskan saat peralihan PBB menjadi Pajak Daerah dari KPP Pratama.

9. Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan

Tabel 42			
Capaian Sasaran 9			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi (2017)	78 kali	78 kali	100,00%
Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi (2018)	72 kali	71 kali	98,61%
Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi (2019)	72 kali	72 kali	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

10. Tersusunnya Raperda Pajak

Tabel 43			
Capaian Sasaran 10			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah dokumen Raperda Pajak (2017)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
Jumlah dokumen Raperda Pajak (2018)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
Jumlah dokumen Raperda Pajak (2019)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

11. Terawasinya objek pajak

Tabel 44			
Capaian Sasaran 11			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah objek pajak yang diperiksa (2017)	1000 objek pajak	1000 objek pajak	100,00%
Jumlah objek pajak yang diperiksa (2018)	1200 objek pajak	1192 objek pajak	99,33%
Jumlah objek pajak yang diperiksa (2019)	1200 objek pajak	1200 objek pajak	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

12. Terbinanya wajib pajak

Sesuai revisi Menpan RB ada perubahan indikator pada sasaran strategis ini yang semula adalah :

Tabel 45			
Capaian Sasaran 12 Sebelum Revisi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah WP yang diberi penyuluhan (2017)	145 orang	145 orang	100,00%
Jumlah WP yang diberi penyuluhan (2018)	475 orang	875 orang	184,21%
Jumlah WP yang diberi penyuluhan (2019)	651 orang	651 orang	100,00%

Indikator ini tetap disajikan sebagai pembanding. Sedangkan indikator hasil revisi Menpan RB adalah :

Tabel 46			
Capaian Sasaran 12			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah pelaksanaan sosialisasi (2017)	4 kali	4 kali	100,00%
Jumlah pelaksanaan sosialisasi (2018)	7 kali	7 kali	100,00%
Jumlah pelaksanaan sosialisasi (2019)	6 kali	6 kali	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

BAB IV

PENUTUP

Jika dilihat dari data pengukuran kinerja yang telah disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran strategis Bapenda “Meningkatnya PAD” adalah Indikator Kinerja Utama Bapenda dan Tahun 2019 telah tercapai dari target 5,05% terealisasi 13,33 atau 263,90%. Bila dihitung secara jangka panjang yaitu selama 7 tahun PAD Kota Cimahi rata-rata telah mengalami peningkatan sebesar 12,07%.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Setiap Tahunnya” telah tercapai dari target 5% terealisasi 21,05 atau 420,96%.
3. Sasaran strategis “Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah” belum tercapai. Indikator 1 yaitu Tingkat Kepatuhan Pajak dari target 70% hanya tercapai 59,71% atau 85,29%. Sebagian besar SKPD yang tidak dibayar adalah dari Pajak PBB. Hal ini diperkirakan karena masih adanya data sampah yang diwariskan saat peralihan PBB menjadi Pajak Daerah dari KPP Pratama. Indikator 2 yaitu Persentase OPD Penghasil yang mencapai target PAD dari target 70% terealisasi 69,23% atau 98,90%. Hal ini diperkirakan karena kurang akuratan OPD Penghasil dalam penentuan target.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan wajib pajak” belum tercapai, dari target 118.711 lembar SKPD hanya tercapai 81.305 SKPD atau 68,49%. Sebagian besar SKPD yang tidak dibayar adalah dari Pajak PBB. Hal ini diperkirakan karena masih adanya data sampah yang diwariskan saat peralihan PBB menjadi Pajak Daerah dari KPP Pratama.
5. Pencapaian sasaran strategis lainnya yaitu “Terpeliharanya Sistem Perpajakan”, “Tersusunnya Target Pendapatan Daerah”, “Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah”, “Terverifikasinya Data Wajib Pajak”, “Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan”, “Tersusunnya Produk hukum”, “Terawasinya objek pajak” dan “Terlaksananya sosialisasi terkait Pajak Daerah” tidak mengalami permasalahan dan dapat tercapai dengan baik.
6. Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tersebut maka Indikator Kinerja Utama Bapenda sudah dapat tercapai, begitu pula dengan sebagian besar sasaran strategis Bapenda. Namun masih ada beberapa sasaran strategis yang tidak tercapai. Dari hasil tersebut maka untuk penyempurnaan kinerja ada beberapa perbaikan yang harus diperhatikan :
 - a. Data ketetapan PBB harus diperbaharui untuk menghilangkan data yang sudah tidak akurat lagi.

- b. Penetapan target pendapatan harus berdasar pada data yang valid tidak hanya berdasarkan pada penambahan persentase dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 telah kami sajikan sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Kami menyadari bahwa uraian dan penjelasan LKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.